

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang memiliki arti pembangunan, yang kemudian diberikan imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi tersebut menjadi ‘rekonstruksi’ sehingga memberikan arti pengembalian seperti semula.<sup>1</sup> Kamus politik memberikan pengertian, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu kepada tempat yang semula, penggambaran atau penyusunan kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian seperti semula.<sup>2</sup>

Dalam *Black Law Dictionary*,<sup>3</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, yang dapat di artikan bahwa Rekonstruksi memiliki makna suatu proses membangun kembali, membuat kembali, atau mengorganisasikan kembali sesuatu.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya memberikan pandangan dalam rekonstruksi itu terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan, pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga karakteristiknya dan wataknya agar tetap kokoh. Kedua, memperbaiki sesuatu yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. Ketiga, melakukan beberapa pembaharuan dengan tidak merubah watak dan karakteristik asli. Dari sini dapat

---

<sup>1</sup> Alwi hasan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat”, PT.Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 22.

<sup>2</sup> Mirja Fauzul Hamdi, “Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, April 2018, hlm. 189.

<sup>3</sup> Bryan A.Garner, “Black’ Law Dictionary”, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

dipahami bahwa rekonstruksi tidak selalu memberikan kebaruan setiap saat terhadap objek yang di rekonstruksi, akan tetapi rekonstruksi merupakan suatu kegiatan berdasarkan tiga poin diatas yang sesuai dengan kebutuhan objek tersebut sesuai dengan keadaan saat ini.<sup>4</sup>

Rekonstruksi berdasarkan penjelasan yang telah di jabarkan berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, yang dimana dalam kegiatan rekonstruksi tersebut perlu memperhatikan nilai-nilai primer dari objek tersebut yang harus tetap ada dalam aktifitas rekonstruksi.

Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu tersebut, baik itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lampau, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, wajib menjadi perhatian bagi para rekonstuktur melihat dari berbagai sisi agar hal yang coba untuk dibangun kembali sesuai dengan maksud tujuan pembentukan dan selaras dengan keadaan masyarakat pada saat ini agar substansi dari hasil rekonstruksi tersebut tidak menjadi polemik. Artinya, rekonstruksi merupakan suatu perbuatan restrukturisasi dan sinkronisasi beberapa undang-undang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberi perhatian pada tiga syarat, yaitu<sup>5</sup>:

1. Rekonstruksi harus dapat mencakup seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *“Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih”*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014, hlm. 212

<sup>5</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, *“Reconstruction Of Decision Bapepam-LK No.412/BL/2010 Concerning On The Trustee Contract”*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. V, No. 3, September-Desember 2018, hlm. 464.

2. Rekonstruksi tidak boleh ada yang kontradiksi logis. Misalnya, ada doktrin yang menyatakan bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotek atas barangnya sendiri. Doktrin ini salah karena konstruksi membuat hipotek sendiri adalah hak milik seseorang atas properti orang lain.
3. Substansi rekonstruksi harus jelas dan sederhana.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum merupakan salah satu cara meningkatkan responsibilitas dari hukum yang ada pada saat ini untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu pula rekonstruksi merupakan suatu cara untuk mengembangkan hukum atau materi dari hukum positif melalui penalaran logis demi tercapainya tujuan yang diinginkan dari hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Pengadilan dan Peradilan**

### **a. Pengertian Pengadilan dan Peradilan**

Pengadilan dan Peradilan pada dasarnya telah di jelaskan secara tidak langsung di dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan dasar hukum dari pengadilan dan sistem peradilan yang ada di Indonesia, setiap aktifitas peradilan harus mengacu kepada UU Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Jika mengacu kepada Pasal 2 yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur tentang asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang erat hubungannya dengan sistem peradilan yang di praktekkan di

setiap pengadilan di Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa *“Peradilan dilakukan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*, jika melihat frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu hal yang sakral karena pertanggungjawabannya berhubungan langsung dengan Tuhan YME. Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa *“Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”* Ideologi yang dibangun oleh masyarakat Indonesia berangkat dari sila-sila yang ada dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, hal yang sama juga ada dalam ruh kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila.

Melihat dari penjabaran Pasal 2, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan suatu proses yang didalamnya ada sistem penerapan dan penegakan hukum yang berdasar pada keadilan yang berlandaskan kepada Pancasila, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Tidak terbatas terhadap itu, melihat dalam sebuah tulisan yang diakses dari laman resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, disebut antara lain bahwa:

*“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari*

sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.” Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.<sup>6</sup>

Istilah pengadilan dalam UU Kekuasaan Hakim sendiri terdapat dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang pengadilan, secara umum dapat disimpulkan dari Pasal 4 tersebut bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## **b. Badan Peradilan**

---

<sup>6</sup> Anonim, *Pengertian Peradilan*, <http://www.pn-tanahgrogot.go.id>, diakses pada 20 Juni 2019

Badan peradilan merupakan suatu elemen penting dalam suatu sistem hukum, karena badan peradilan yang menjalankan hukum formil yang merupakan penerapan dari sebuah hukum materiil. Badan peradilan tertinggi di Indonesia di pegang oleh Mahkamah Agung yang membawahi badan peradilan lainnya, seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 18 UU Kehakiman yang berbunyi *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”* yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Kehakiman berbunyi: *“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”*<sup>7</sup>

Pasal 11 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, yang berarti bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara yang membawahi dari semua lingkup peradilan yang ada di Indonesia atau bisa disebut sebagai puncak dari semua peradilan yang ada dibawahnya, dan peradilan tingkat terakhir (kasasi) dari seluruh peradilan yang ada dibawahnya. Mahkamah Agung diatur dalam UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 5 Tahun 2004, kemudian

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

perubaha terakhir UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA).<sup>8</sup>

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan pasal 25 UU Kehakiman terdapat peradilan<sup>9</sup> :

#### **A. Peradilan Umum**

Peradilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan Umum diatur dalam UU No.2 Tahun 1986 kemudian dirubah oleh UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan kemudian perubahan terakhir UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan tingkat terakhir dari berada di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.<sup>10</sup>

#### **B. Peradilan Agama**

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peradilan Agama

---

<sup>8</sup> Umar Said Sugiarto, *op.cit*, hlm. 95.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Umar Said Sugiarto, *op.cit*, hlm. 92.

diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UUPAG). Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Tinggi Agama, dan puncak dari pengadilan terdapat pada Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

### **C. Peradilan Militer**

Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan Militer diatur dalam UU No.5 Tahun 1950 Tentang Peradilan Militer yang kemudian diubah dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Susunan dari Pengadilan Militer meliputi, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Pertempuran, dan puncak dari pengadilan militer juga terdapat di Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

### **D. Peradilan Tata Usaha Negara.**

Peradilan tata usaha berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dari peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 103.



perubahan terakhir UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN). Kekuasaan kehakimahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).<sup>14</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013, hlm. 180-181.

hukum (*onrechmatigheid* dan *wederrechtelijkheid*) dan tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pengistilahan tentang “*Strafbaar feit*” ada yang mengistilahkan dengan sebutan Tindak Pidana dan ada juga yang mengistilahkan sebagai Perbuatan Pidana, sebenarnya pada hakikatnya dua istilah tersebut memiliki substansi yang sama, akan tetapi hanya terdapat dalam pembeda didalam pengistilahan tersebut. Jika dalam bukunya Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro digunakan istilah Tindak Pidana sedangkan dalam bukunya Mahrus Ali, S.H., M.H. digunakan istilah Perbuatan Pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> Batasan yang serupa juga dikatakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Pembentuk undang-

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 1.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>18</sup>

#### **D. Tinjauan *Contempt Of Court***

##### **a. Pengertian *Contemp of Court***

*Contempt of court* merupakan perbuatan manapun yang diperhitungkan mempersulit, memperlakukan, menghalangi, atau menghalangi pengadilan atau yang diperhitungkan untuk berkurang kekuasaan atau martabatnya.<sup>19</sup>

Adapun pengertian *contempt of court* dalam Undang-Undang Federal Amerika Serikat (Andi Sofyan, 2013; 406) adalah *contempt of court* diartikan sebagai *misbehavior in the presence of the court or so near threato as to obstruct the administration*. Jika diterjemahkan secara bebas membawa pengertian tindak-tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya sehingga dapat merintangi proses peradilan.<sup>20</sup>

Dijelaskan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I No. : KMA/005/SKB/VII/1987 dan Menteri Kehakiman R.I No. : M.03-PR.08.05

---

<sup>18</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 50

<sup>19</sup> Marwan, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.136.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 406.

Tahun 1987, mengkualifikasi perbuatan seorang Penasihat Hukum sebagai *contempt of court*, adalah sebagai berikut :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawannya atau kuasanya
- c. Berbuat, bertingkah laku, bersikap, bertutur kata atau mengeluarkannya pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, pengadilan atau pejabatnya.
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

Pelanggaran terhadap Pasal 3 SKB tersebut, menurut Pasal 4-nya dapat dikenai tindakan berupa :

- a. Teguran lisan atau tertulis
- b. Peringatan keras dengan surat
- c. Pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 sampai 6 bulan
- d. Pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 bulan
- e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai penasihat hukum

Contempt of court dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012, diartikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. *Contempt of court* pada awalnya

merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan.

Pengertian *contempt of court* hingga saat ini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum dijelaskan secara konkrit, namun beberapa pakar memberikan batasan terhadap *contempt of court*, antara lain menurut pendapat, bahwa *contempt of court* adalah : “Merendahkan wibawa peradilan dan martabat hakim, selama berlangsungnya persidangan”. Lebih lanjut oleh bahwa ada juga yang memaknai *contempt of court* sebagai :

Perbuatan melecehkan sebagai penghinaan hakim yang dilakukan oleh Pengacara atau Advokat atau Wartawan dan atau Orang lain yang berkepentingan dengan Peradilan.

*Black Laws* memberikan pengertian *Contempt of court* yaitu sebagai berikut<sup>21</sup> :

“Suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 404-405

dipengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau memenuhi hal yang ia telah akui”.

Muladi memberikan batasan tentang *contempt of court* adalah Suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *contempt of court* yang telah sebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, Jaksa, Terdakwa ataupun Advokat serta saksi-saksi dan pengunjung sidang pengadilan yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan dengan tujuan menghalangi jalannya persidangan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan *contempt of court*. Tindakan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan, dapat dilakukan secara aktif maupun pasif.

#### b. Dasar Hukum *Contempt of Court*

Istilah *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaikbaiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 406.

sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Selanjutnya, di dalam ketentuan KUHP terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pengadilan yang tercantum di dalam Pasal 207, Pasal 210, Pasal 217, Pasal 224, dan Pasal 233 KUHP:

#### Pasal 207 KUHP

*“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

#### Pasal 210 KUHP

*“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

- 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

*(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pembedaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

*(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.”*

#### Pasal 217 KUHP

*“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”*

#### Pasal 224 KUHP

*“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

- 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”*

#### Pasal 233

*“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk*



*meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pasal dalam KUHPidana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *contempt of court*, yang dapat dikenakan kepada pers:

Pasal 207 KUHP, yang pada intinya berbunyi :barangsiapa dengan sengaja didepan umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa.

Pasal 208 KUHP, yang pada intinya berbunyi : menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum.

Ketentuan dalam KUHP juga ada yang mengatur terhadap perbuatan *contemp of court* ini, terdapat dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 174 Ayat (1) dan (2)

*“(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.*

*(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum'atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu."*

Pasal 159 Ayat (2)

*"(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa saksi itu tidak.akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan."*

Pasal 161 Ayat (1)

*"(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari."*

Pasal 176 Ayat (1)

*"(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang , kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa."*

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.”

Kemudian, akademisi yang juga praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan *Contempt of Court*” berpendapat, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.<sup>23</sup>

Lebih jauh, masih menurut Luhut dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.<sup>24</sup>

Pengaturan tentang *Contempt of Court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang *Contempt of Court* merupakan upaya

---

<sup>23</sup> Luhut M.P., *Advokat dan Contempt Of Court*, Djambatan, Jakarta, hlm. 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*

hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung pengadilan. Jadi, yang dimaksud dengan “*contempt of court*” adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

#### **E. Tinjauan Tentang Pers**

Perkembangan Pers di Indonesia telah di mulai sejak sebelum Indonesia merdeka. Pers memiliki peranan yang penting dalam proses memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia. Surat kabar pertama kali di kenalkan ke Indonesia oleh orang-orang Belanda pada pertengahan abad ke 18 dan pada saat itu pertumbuhan pers di kekang oleh penguasa kolonial (sistem pers otoriter), meskipun penerbitnya oleh orang belanda itu sendiri. Seiring berjalannya waktu perkembangan pers semakin terlihat peranannya dalam pergerakan di Indonesia, terlihat pada pertengahan abad ke 19 para cendikiawan Indonesia memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.<sup>25</sup>

Selanjut dunia pers terjadi pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang sudah mulai terorganisir dengan baik, dimana wartawan menjadi seorang tokoh pergerakan atau mungkin sebaliknya para tokoh pergerakan menerbitkan

---

<sup>25</sup> Inge Hutagalung, “*Dinamika Sistem Pers Indonesia*”, Jurnal Interaksi, Vol. II, No. 2, Juli 2013, hlm. 55.

pers. Sejak lahirnya Budi Utomo bulan Mei 1908, pers menjadi suatu bagian penting dalam sarana komunikasi yang utama untuk meningkatkan kesadaran nasional dan memperluas kebangkitan nasional Indonesia.<sup>26</sup>

Kehidupan dunia pers mulai mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan dan sepanjang demokrasi terpimpin, hingga menjelang orde baru tahun 1966, hal tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi politik pada saat itu yang di mana terdapat pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi dalam dunia kepartaian yang berimbas kepada kehidupan pers nasional, sehingga terdapat pihak pers yang mendukung pemerintah (prokabinet) dan satu pihak pers mendukung oposisi. Sehingga sebagian pers memilih *pola pers bebas* seperti di negara liberal, dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggungjawab yang ditentukan oleh wartawan secara individualis. Kondisi pers nasional tersebut terus berjalan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1949, dan masa pemerintahan parlementer antara tahun 1950-1959. Ekses kondisi ini merupakan suatu fenomena penodaan terhadap kebebasan pers.<sup>27</sup>

Pada masa orde baru ini produk perundang-undangan pers pertama kali di buat yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 1966, yang kemudian di sempurnakan dalam UU No. 21 Tahun 1982. Adanya lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan suatu langkah yang mengarah pelaksanaan kebebasan pers yang di kendalikan oleh pemerintah atau dikatakan pula kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada pemerintah, hal tersebut merupakan suatu cerminan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dari teori pers otoriter. Dapat dilihat dari implementasi kebebasan pers yang ada pada rezim Soeharto yang menyatakan pers merupakan sarana media pendukung keberhasilan pembangunan, yang berarti kepentingan pers pada saat itu hanya terhadap kepentingan nasional pembangunan. Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa jiwa pers yang ada pada masa orde baru tidak mempunyai kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah orde baru.<sup>28</sup>

Tidak adanya kebebasan berpendapat yang di miliki oleh pers ini membuat media di Indonesia gagal dalam menjalankan perannya sebagaimana mestinya pada masa orde baru. Pemerintah orde baru menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas dari negara, keamanan dan kepentingan umum, karna alasan itulah pers dikontrol secara ketat. Maka atas ketakutan tersebut terjadi sifat represif negara terhadap pers sepanjang masa orde baru.<sup>29</sup>

Perubahan jiwa dari pers yang semula dikekang oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya berlangsung saat era reformasi di mulai, dengan di undangkannya UU No.40 Tahun 1999, Undang-undang tersebut secara normatif menganut teori teori pers tanggungjawab sosial yang dimana pers harus bertanggungjawab kepada masyarakat terhadap pemberitaan yang di sebar. Termuat dalam pasal 15 dan 17 UU No.40 Tahun 1999.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hal mendasar yang menjadi alasan pers harus ditekankan kepada tanggungjawab sosial merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya kemungkinan terganggunya ketertiban umum. Peterson mengatakan, bahwa kebebasan pers wajib disertai tanggung jawab terhadap masyarakat agar terlaksananya tugas pokok yang dibebankan komunikasi terhadap massa di masyarakat modern ini, idealnya tidak terbatas hanya pers sistem ini juga harus diterapkan terhadap hal apapun yang menyangkut kepentingan umum.<sup>31</sup>

Melihat terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini berkembang di masyarakat akan perkembangan pers yang sangat pesat menjadi suatu kekhawatiran dengan peningkatan kuantitas media akan tetapi menghiraukan kualitas dari pemberitaan yang disampaikan dalam media tersebut, dimana media pada saat ini cenderung mementingkan keuntungan dibandingkan tanggungjawab sosial dari pers itu sendiri terhadap masyarakat, jelas ini merupakan suatu fenomena yang tidak diinginkan oleh undang-undang quo. Dimana kejadian tersebut menjadikan sistem pers di Indonesia malah menjadi sistem pers bebas dan tidak bertanggungjawab, yang berartikan sistem pers di Indonesia begitu bebas, sehingga gagal dalam mengemukakan prinsip-prinsip dari jurnalistik dan tidak mempunyai peran positif di masyarakat. Pers juga kerap digunakan sebagai jalan kepentingan politik segelintir orang ataupun kelompok, hal tersebut sebagai suatu dampak pemusatan kepemilikan media pada segelintir orang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Hadijah Arnus, *Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, Jurnal Al-Munzir, Vol. 8, No. 1, Mei 2015, hlm. 106.

<sup>32</sup> *Ibid.*